

IMPLEMENTASI PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU

Urwatil Wusqo

NPP. 29.0296

Asdaf Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

Program Studi Kebijakan Publik

Email : urwatil1919@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Pekanbaru City, based on data from the last five years obtained from the Pekanbaru City Social Service, recorded an increase. The old paradigm of society where people with disabilities are only 'objects' of social assistance recipients should have turned into 'subjects' who are empowered as part of nation building. **Purpose:** This research is to find out how the implementation of community development and empowerment of people with disabilities in Pekanbaru City and the supporting factors and obstacles to the implementation of community development and empowerment of people with disabilities in Pekanbaru City. The policy of fostering and empowering people with disabilities in Pekanbaru City aims to provide equal rights and make people with disabilities independent in the community. **Method:** The research design used in this study is a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. The research was carried out at the Pekanbaru City Social Service. **Result:** From the six implementation indicators proposed by Van Meter and Van Horn, it was found that there were two indicators that were not optimal, namely the resources and attitude of the implementers. **Conclusion:** Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of community development and empowerment of people with disabilities in Pekanbaru City has not been carried out properly due to several things that are inhibiting factors in the implementation of this policy. In its implementation, there are several supporting factors, namely the existence of a budget from the Pekanbaru City Social Service, the support from the Riau Province Social Service, and the presence of human resources. The inhibiting factor is that there are still people with disabilities who have not been recorded and there are still people with disabilities who are reluctant to open up.

Keywords: Implementation, People with Disabilities, Community Development, Empowerment

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kota Pekanbaru berdasarkan data lima tahun terakhir yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru tercatat mengalami peningkatan . Paradigma lama masyarakat dimana penyandang disabilitas hanya sebagai 'objek' penerima bantuan sosial saja, seharusnya telah beralih menjadi 'subjek' yang diberdayakan sebagai bagian dari pembangunan bangsa. **Tujuan:** Untuk mengetahui bagaimana implementasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru dan faktor pendukung serta penghambat implementasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Kebijakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru bertujuan untuk memberikan kesamaan hak dan memandirikan masyarakat penyandang disabilitas di tengah masyarakat. **Metode:** Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. **Hasil:** Dari keenam indikator implementasi yang dikemukakan van meter dan van horn ditemukan ada dua indikator yang belum optimal, yaitu sumber daya dan sikap pelaksana. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik disebabkan oleh beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ini. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor pendukung yaitu adanya anggaran dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru, adanya dukungan dari Dinas Sosial Provinsi Riau, dan adanya sumber daya manusianya. Faktor penghambatnya yaitu masih adanya masyarakat penyandang disabilitas yang belum terdata dan masih adanya masyarakat penyandang disabilitas yang enggan membuka diri.

Kata Kunci: Implementasi, Penyandang Disabilitas, Pembinaan, Pemberdayaan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jumlah populasi Indonesia terbaru menurut Biro Sensus Amerika Serikat adalah 275.122.131 jiwa sedangkan menurut Worldometers jumlah

populasi Indonesia sebanyak 273.523.615 jiwa.¹ Berdasarkan jumlah penduduk di Indonesia tersebut tidak semua memiliki nasib yang baik.

Adapun jumlah penyandang disabilitas yang bersumber pada Kemensos melalui SIMPD (Sistem Informasi Manajemen Penyandang Disabilitas) terdata sejumlah 209.604 jiwa hingga tanggal 13 Januari 2021.²

Istilah penyandang cacat dan difabel berkembang menjadi penyandang disabilitas. Selain istilahnya yang berkembang dan beragam, penyandang disabilitas juga mendapati beraneka ragam reaksi penerimaan oleh masyarakat. Mengenai hak asasi manusia telah mempunyai payung hukum yang kuat yaitu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 hingga pasal 34. Dengan adanya undangundang tersebut maka tidak ada perbedaan perlakuan terhadap penyandang disabilitas. Regulasi yang menjamin ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pemerintah juga berperan dalam memberdayakan masyarakat penyandang disabilitas. Pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan bina. Peningkatan kemampuan masyarakat penyandang disabilitas merupakan tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memiliki beraneka ragam disabilitas. Ragam disabilitas tersebut adalah penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah penyandang disabilitas yang cukup tinggi, yaitu berjumlah 3.873 orang. Kota Pekanbaru berdasarkan data lima tahun terakhir yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru tercatat mengalami peningkatan baik untuk jumlah orang dengan kedisabilitasan maupun anak dengan kedisabilitasan. Berikut ini tabel jumlah penyandang disabilitas lima tahun terakhir di Kota Pekanbaru.

¹ Aditya Jaya Iswara, 5 Negara dengan Penduduk Terbanyak 2021, Indonesia Termasuk, diakses pada tanggal 01 September 2021, pukul 13.52 Wita.

² Wapres:Dukung Kesenjangan Warga Negara dalam Berkarya, diakses pada tanggal 01 September 2021, pukul 13.58 Wita.

Sama halnya dengan penyandang disabilitas pada umumnya, hal yang sama juga terjadi terhadap mereka di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Penyandang disabilitas masih mengalami kondisi yang kurang baik mulai dari permasalahan pendidikan, penerimaan masyarakat, perlindungan sosial, dan juga lapangan pekerjaan. Kompleksitas yang diciptakan karena keterbatasan diberbagai sektor ini ketika keterbatasan fungsi yang dimiliki penyandang disabilitas sehingga tidak dapat diakomodasi oleh lingkungan. Tentunya hal ini membuat pelayanan publik sulit dirasakan oleh penyandang disabilitas dan ini juga mempengaruhi partisipasi penyandang disabilitas, khususnya dalam sektor giat sosial dan ekonomi.

Meningkatkan kesadaran segala pihak tentang disabilitas dan menghilangkan stigma yang telah berkembang selama ini terhadap disabilitas serta merta memberikan dukungan penuh untuk meningkatkan kemandirian dan kesamaan hak terhadap penyandang disabilitas dalam berbagai sektor adalah tugas bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Pandangan bahwa penyandang disabilitas merupakan pihak yang lemah serta tak berdaya tidak boleh lagi dipertahankan, paradigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas harus berubah. Paradigma lama masyarakat dimana penyandang disabilitas hanya sebagai 'objek' penerima bantuan sosial saja, seharusnya telah beralih menjadi 'subjek' yang diberdayakan sebagai bagian dari pembangunan bangsa.

Provinsi Riau telah memiliki regulasi yang mengatur tentang penyandang disabilitas, yaitu Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Tidak hanya itu, Provinsi Riau melalui dinas sosial telah menyediakan pelayanan publik untuk penyandang disabilitas. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih inklusif yang akan membuat penyandang disabilitas dapat menikmati hak asasi secara utuh serta dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan kemampuan terbaik yang mereka miliki.

1.3 Penelitian Terdahulu

Dwinda Mayrizka, (2015) dengan judul : Strukturasi Implementasi Kebijakan Disabilitas. Rumusan masalah penelitian ini adalah, bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo, dan bagaimana kesadaran penyandang disabilitas setelah mengikuti kegiatan pelatihan keterampilan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola dimensi struktural dari kebijakan disabilitas adalah

legitimasi-dominasi-signifikasi. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan implementasi kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas belum berjalan dengan maksimal. Hal ini disebabkan oleh pemerintah yang berperan dominan dalam mengatur masyarakat. Penelitian terdahulu kajiannya lebih fokus pada struktural dari implementasi kebijakannya dan kesadaran penyandang disabilitas setelah mengikuti kegiatan pelatihan. Sementara penelitian sekarang berfokus pada implementasi dari kebijakan pembinaan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dan faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.³ Iik Sakinah, Slamet Muchsin, dan Suyeno, (2020) dengan judul : Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana implementasi peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas pada rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di Kota Malang, dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data di dalamnya terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah terbukti telah terlaksana sebanyak 9 bentuk rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dengan baik. Terdapat juga UEP (Usaha Ekonomi Kreatif) untuk meminimalisir rasa ketergantungan yang dimiliki masyarakat penyandang disabilitas kepada masyarakat lainnya. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Penelitian terdahulu kajiannya berfokus pada landasan legalistik berupa perda, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada kebijakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Provinsi Riau.⁴

Moh Nashir Hasan, (2018) dengan judul : Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh DPC PPDI Kota Semarang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana pemberdayaan penyandang disabilitas oleh DPC PPDI Kota Semarang, dan apa faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Sumber datanya adalah data

³ Dwinda Mayrizka, "Strukturasi Implementasi Kebijakan Disabilitas," *Jurnal Mahasiswa Sosiologi*, 2015, 1–33.

⁴ Iik Sakinah, Slamet Muchsin, and Suyeno, "Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas(Studi Pada Rehabilitasi Sosial Disabilitas Kota Malang)," *Respon Publik* 14, no. 3 (2020): 43–50.

primer dan data sekunder Adapun hasilnya menunjukkan strategi pemberdayaan penyandang disabilitas oleh DPC PPDI Kota Semarang antara lain : motivasi, peningkatan kesadaran, dan pelatihan kemampuan manajemen diri, mobilisasi sumber daya, dan pembangunan dan pengembangan jejaringan. Terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang beragam. Yang membedakan antara penelitian ini dan sebelumnya adalah organisasi yang melaksanakannya.⁵

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Pada ketiga penelitian sebelumnya dapat dilihat bahwa memiliki tiga fokus yang berbeda-beda di setiap penelitiannya. Dalam penelitian penulis kali ini, penulis akan menyatukan ketiga fokus tersebut menjadi satu kesatuan dalam judul penulis.

1.5 Tujuan

Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru dan Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru.

II. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh melalui metode dan analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dipergunakan dalam berbagai penelitian mengenai kehidupan masyarakat, aktivitas sosial, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, sejarah, dan ekonomi. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif digunakan dengan tujuan agar penelitian ini berfokus dalam mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa dan kejadian yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini mempermudah peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengkaji dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pembinaan

⁵ Moh Nashir Hasan, "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh DPC PPDI Kota Semarang," *Skripsi*, 2018.

dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Provinsi Riau.

Sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah: peraturan perundang-undangan, literatur, catatan, dokumen, maupun artikel. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif maka pada penelitian ini hanya menggunakan informan sebagai sumber data penelitian, sehingga untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara jelas, mendetail, akurat dan terpercaya hanya bisa diperoleh melalui informan. Dalam upaya mendapatkan data dan informasi yang valid dengan fokus penelitian, maka dalam menentukan informan penulis menggunakan teknik “purposive sampling”. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti mengadopsi dari Miles et al (2014). Setelah memperoleh data yang dianggap valid oleh peneliti maka selanjutnya peneliti harus melakukan uji validitas terhadap data tersebut. Strategi yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan triangulasi

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Standar dan Sasaran Kebijakan

Faktor penting dalam keberhasilan suatu kebijakan selaras dengan yang dinyatakan oleh Van Metter dan Van Horn (1975:462) bahwa “Essentially, the performance indicators assess the extent to which the SROLF V VWDQGDUGV DQG REMHFWLYHV DUH UHDOLJHG 6WDQGDUGV DQG REMHFWLYHV elaborate on the overall goals, of the policy decision”. Pendapat ini dapat diartikan bahwa indikator keberhasilan suatu kebijakan terletak pada sejauh mana standar dan tujuan kebijakan dapat terealisasi. Oleh karena itu ukuran dasar atau standar dan tujuan kebijakan harus jelas dan realistis untuk dicapai dalam pelaksanaannya.

Dalam dimensi ini, penulis melihat terdapat dua indikator yang penting untuk diperhatikan, yaitu ketepatan dan kecepatan.

a) Ketepatan

Ketepatan disini maksudnya adalah dalam hal kegiatan pembinaan dan pemberdayaan yang dicanangkan telah sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku serta sesuai dengan capaian yang diinginkan (*goals*). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 merupakan dasar dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat

penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Dinas sosial yang merupakan lokus dalam penelitian kali ini, melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat penyandang disabilitas yang merupakan amanat dalam peraturan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dilihat bahwasannya tujuan dan standar yang ditetapkan dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru sudah sangat jelas serta realistis dengan terus menerus menjangkau masyarakat penyandang disabilitas serta melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan sehingga seluruh masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru khususnya dapat merasakan manfaatnya dari kebijakan ini.

b) Kecepatan

Kecepatan artinya adanya sikap responsif terhadap tuntutan dan kebutuhan penyandang disabilitas dari aparat pemerintah. Perihal ini muncul beragam pertanyaan dan keingintahuan dari penulis, seperti bagaimana responsivitas dinas sosial yang merupakan lokus penulis, reaksi pemerintah Kota Pekanbaru, hingga kinerja pemerintah setempat dalam merespon kebutuhan penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa kecepatan aparat pemerintah dalam merespon kebutuhan penyandang disabilitas sudah baik.

3.2 Sumber Daya

Tachjan (2006:135) mengungkapkan bahwa “sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis.” Proses pelaksanaan suatu kebijakan dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya pendukungnya. Dengan tersedianya sumber daya yang memadai akan mempermudah dan mendukung proses pelaksanaan suatu kebijakan, sebaliknya jika sumber daya tidak mencukupi justru akan memperlambat atau mempersulit pelaksanaan suatu kebijakan.

Dalam dimensi ini, penulis merumuskan terdapat empat indikator yang akan menjadi pusat perhatian bagi penulis, yaitu sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana, dan sumber daya finansial.

a) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia menjadi salah satu aspek penting dalam membuat berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Sumber daya manusia yang dimaksudkan disini adalah yang berkompeten dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara dilihat sebenarnya Dinas Sosial Kota Pekanbaru kekurangan sumber daya manusia di bidang yang menangani permasalahan penyandang disabilitas. Namun walaupun demikian, dengan keterbatasan jumlah ini tetap mampu bekerja secara maksimal dikarenakan adanya bantuan dari TKS yang ada di setiap kelurahan. Tetapi, jika kita lihat kembali penambahan sumber daya manusia di bidang yang menangani penyandang disabilitas diperlukan tambahan sumber daya manusia.

b) Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana tentunya akan berkaitan dengan ketersediaan fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sekretaris Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat kita lihat bahwasannya sarana dan prasarana dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat penyandang disabilitas sudah cukup memadai. Namun untuk gedung sebenarnya jika terdapat anggaran, Dinas Sosial Kota Pekanbaru tentunya bisa membuat gedung sendiri untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat penyandang disabilitas secara maksimal lagi.

c) Sumber Daya Finansial

Membahas mengenai sumber daya finansial tentu saja berkaitan langsung dengan anggaran atau pendanaan. Dalam melakukan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas tentu saja membutuhkan pendanaan yang mumpuni agar bisa terlaksana dengan baik. Sebagaimana yang diketahui masyarakat penyandang disabilitas dengan segala keterbatasannya membutuhkan beragam fasilitas alat bantu dalam kesehariannya. Anggaran untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas sudah diguyurkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Setiap tahunnya anggaran selalu turun ke Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk disalurkan dan dipergunakan bagi masyarakat penyandang disabilitas. Tidak sampai disitu, sumber dana Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga memperoleh bantuan dari

CSR, yaitu PT Angkasa Pura yang juga selalu ambil peran dalam menunjang kesejahteraan bagi masyarakat penyandang disabilitas.

3.3 Karakteristik Agen/Badan Pelaksana

Pembahasan mengenai karakteristik agen atau badan pelaksana memiliki arti bagaimana tingkat kontrol organisasi pelaksana serta bagaimana tingkat keterbukaan badan organisasi pelaksana dalam implementasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru.

a) Tingkat Kontrol Organisasi Pelaksana

Pengawasan atau kontrol kebijakan merupakan suatu keperluan yang sudah wajib untuk dilaksanakan oleh pelaksana suatu kebijakan agar kebijakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas dapat berjalan dengan baik dan tercapai tujuan yang ingin dicapai. George R Terry yang dikutip oleh Sukarna (2011) bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap yang dilakukan oleh organisasi apakah sudah sesuai dengan rencana ataukah belum.

Dari hasil wawancara terlihat bahwasannya kontrol penuh sangat diberikan oleh dinas sosial dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas. Bahkan kedisiplinan dari staf yang ada di dinas sosial pun sangat ditekankan agar seluruh tujuan dapat dicapai dan sasaran yang ingin dituju pun tepat sasaran.

b) Tingkat Keterbukaan Badan atau Lembaga Pelaksana

Adanya keterbukaan dari organisasi pelaksana khususnya disini adalah Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas akan menimbulkan kepercayaan dari masyarakat kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Hasil wawancara menunjukkan keterbukaan lembaga pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah menunjukkan keterbukaan kepada masyarakat dengan harapan bahwa masyarakat juga akan memahami dengan baik bagaimana kondisi yang ada dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas. Dari sisi pihak dinas sosial, yaitu kepala seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang diwawancarai oleh penulis, kita dapat melihat bahwa dinas sosial telah

mengupayakan keterbukaan kepada masyarakat dengan giat-giat yang dilakukannya seperti sosialisasi. Dan dari hasil wawancara dengan tokoh pemuda pun menanggapi bahwa dinas sosial sudah cukup terbuka dengan masyarakat sehingga perolehan informasi pun mudah untuk diperoleh oleh masyarakat.

3.4 Sikap Pelaksana

Dalam melaksanakan suatu kebijakan, para pelaksana kebijakan seharusnya telah memahami kebijakan yang diputuskan dan ikut mendukung kebijakan tersebut agar kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Sikap pelaksana ini digolongkan oleh penulis kedalam tiga indikator, yaitu respon, kognitif, dan intensitas.

a) Respon

Responsivitas ini tidak hanya terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat penyandang disabilitas saja, namun juga bagaimana respon unsur pelaksana atas perintah pimpinan. Berdasarkan hasil wawancara penulis menarik kesimpulan bahwa sikap tanggap atau responsivitas dari pelaksana yaitu Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah sangat baik. Tidak hanya tanggap, namun juga cepat dalam merespon kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas dan kebijakan dari pimpinan juga dilaksanakan dengan baik.

b) Kognitif

Unsur organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru harus memahami apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya dalam mengimplementasikan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas. Hasil wawancara membuktikan bahwa unsur organisasi dinas sosial memahami dengan benar apa sebenarnya yang menjadi tanggung jawabnya. Pelaksanaan evaluasi kinerja yang rutin dilaksanakan membuat kinerja dari dinas sosial juga sudah tidak perlu diraukan lagi.

c) Intensitas

Intensitas disini memiliki maksud yaitu mengenai beban kerja yang dimiliki oleh unsur pelaksana di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Hasil wawancara menunjukkan bahwa beban kerja itu memang ada namun seluruh unsur pelaksana sangat menikmati pekerjaan mereka sehingga itu semua tidak menjadi beban dalam melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan

masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Tapi dapat kita lihat juga, kekurangan staf ini kedepannya akan menjadi sebuah masalah jika tidak diatasi dengan segera.

3.5 Komunikasi Antar Organisasi dan Pengukuhan Aktivitas/ Aktivitas Pelaksana

Komunikasi ialah salah-satu faktor penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari Implementasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Pelaksanaan kebijakan yang efektif terjadi jika para pelaksana kebijakannya telah mengetahui dan memahami apa yang mereka harusnya kerjakan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan harus dikomunikasikan dengan baik kepada pihak terkait.

a) Akurasi dan Konsistensi Komunikasi Antar Organisasi

Akurasi dapat diartikan sebagai tingkat ketepatan. Sedangkan konsistensi berarti keteguhan pendirian atau ketetapan dalam bertindak. Akurasi dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan akan mendorong tercapainya tujuan kebijakan secara optimal. Penulis menyimpulkan dari pernyataan pada wawancara bahwasannya akurasi serta konsistensi dari dinas sosial dengan organisasi internal maupun eksternal terus menerus berlangsung dengan baik dan dijaga dengan baik dibuktikan dengan kerjasama-kerjasama antar organisasi.

b) Pemberian Sanksi Positif atau Negatif dalam Pelaksanaan Tugas

Ada atau tidaknya sebuah pemberian sanksi positif (*reward*) maupun negatif (*punishment*) merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan suatu kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa perlunya sebuah tolak ukur ataupun pedoman yang harus diperhatikan oleh unsur pelaksana dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga para unsur pelaksana dapat mengetahui batasan serta dapat menjadi penyemangat untuk bekerja lebih giat dari *reward* yang akan diperoleh.

3.6 Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi lingkungan mempunyai pengaruh yang penting terhadap pelaksanaan kebijakan. Lingkungan yang mendukung tentunya akan mempermudah proses pelaksanaan kebijakan.

a) Kondisi Sosial dan Ekonomi

Target atau subjek utama dalam pelaksanaan suatu kebijakan adalah masyarakat dan dalam penelitian ini adalah masyarakat penyandang disabilitas. Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan harus mampu memahami dan melihat kesesuaian kondisi masyarakat dengan kebijakan yang akan dikeluarkan. Berdasarkan hasil wawancara ditarik kesimpulan bahwasannya dinas sosial sendiri memiliki tolak ukur bantuan seperti apa yang harus diberikan kepada masyarakat penyandang disabilitas yang dijangkau. Dinas sosial juga berusaha melakukan yang terbaik dalam memberikan bantuan kepada masyarakat penyandang disabilitas.

b) Sikap Elite dalam Implementasi Kebijakan

Elite merupakan pihak yang memiliki peran dan kekuasaan yang berhubungan dengan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam pembahasan ini yang berkaitan langsung adalah Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Pemerintah Kota Pekanbaru. Disini sikap elite sangat berperan penting dalam setiap langkah pengambilan keputusan. Berdasarkan wawancara ditarik kesimpulan bahwasannya begitu banyaknya dukungan yang datang dari elite dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Baik dari Kementerian Sosial, anggota DPRD, hingga Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru sangat antusias terhadap masyarakat penyandang disabilitas.

c) Opini Publik Berkaitan dengan Isu Kebijakan

Suatu isu kebijakan tentu saja menggiring sebuah opini publik. Opini publik merupakan sikap dari orang-orang tentang suatu persoalan dimana orang-orang ini merupakan anggota dari masyarakat yang sama. Sikap yang dapat diberikan oleh mereka dapat berupa penerimaan, dukungan, hingga penolakan. Dalam penelitian kali ini penulis mewawancarai beberapa kalangan, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, dan juga masyarakat penyandang disabilitas.

Dari wawancara dengan beberapa narasumber yang diwawancarai penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru sudah mendapatkan perhatian yang cukup baik mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Dukungan yang besar dari masyarakat juga ikut mensukseskan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

3.7 Faktor yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Implementasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru

Pelaksanaan suatu kebijakan bukanlah suatu hal yang mudah. Pencapaian tujuan merupakan hal utama dalam menjalankan suatu kebijakan. Tentu saja dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hal yang mendukung kebijakan tersebut serta akan ada juga faktor penghambat dari kebijakan itu. Berikut penulis akan memaparkan apa saja yang menjadi faktor pendukung serta faktor penghambat dalam implementasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan implementasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas adalah sebagai berikut :

1. Adanya anggaran dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Berdasarkan hasil wawancara memperlihatkan bahwasannya anggaran yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru kepada bagian penyandang disabilitas setiap tahunnya selalu ada dan selalu diberikan dukungan atas segala kegiatannya.
2. Adanya dukungan dari Dinas Sosial Provinsi Riau
Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tidak hanya dukungan dari Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru, namun juga ada dukungan yang cukup besar oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Sosial Provinsi Riau.
3. Adanya Sumber Daya Manusia
Hasil wawancara menunjukkan bahwa sumber daya manusia menjadi inti dari faktor yang mendukung agar pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya masyarakat penyandang disabilitas yang belum terdata
Pernyataan hasil wawancara memperlihatkan bahwasannya salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan dan

pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas adalah dalam hal pendataan. Masyarakat penyandang disabilitas masih belum semuanya dijangkau oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, namun walau demikian Dinas Sosial Kota Pekanbaru senantiasa tetap bekerja keras untuk melakukan pendataan baik dengan cara menjangkau secara langsung ke rumah ataupun adanya masyarakat penyandang disabilitas yang mendatangi kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

2. Masyarakat penyandang disabilitas masih banyak yang tidak mau membuka diri

Pernyataan hasil wawancara disimpulkan bahwa masyarakat penyandang disabilitas masih enggan untuk berbaur serta diberikan pembinaan dan pelatihan terhadap mereka. Tidak hanya masyarakat penyandang disabilitasnya saja, namun terkadang penolakan itu juga datang dari pihak keluarga yang bersangkutan.

3.8 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian yang penulis teliti ditemukan terdapat dua indikator sebagai tolak ukur implementasi suatu kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yang tidak berjalan optimal. Yang pertama yaitu sumber daya dan yang kedua yaitu sikap pelaksana sebagaimana yang telah dijelaskan di atas sebelumnya. Disini dapat terlihat bahwa ini merupakan temuan baru yang ditemukan oleh penulis dalam penelitiannya dimana hal ini berbeda dengan ketiga penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi oleh penulis dalam melakukan penelitian.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas belum terlaksana dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari belum terpenuhinya semua faktor-faktor dalam penentuan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan yaitu :
 - a) Standar dan Sasaran Kebijakan. Sudah tepat sasaran dan kecepatan aparat pemerintah dalam merespon kebutuhan penyandang disabilitas sudah baik.

- b) Sumber Daya. Jika dilihat kembali penambahan sumber daya manusia di bidang yang menangani penyandang disabilitas diperlukan tambahan sumber daya manusia. Dinas Sosial Kota Pekanbaru tentunya bisa membuat gedung sendiri untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat penyandang disabilitas secara maksimal lagi.
- c) Karakteristik Agen/Badan Pelaksana. Kontrol penuh dari dinas sosial dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas. Dinas sosial telah mengupayakan keterbukaan kepada masyarakat dengan giat-giat yang dilakukannya seperti sosialisasi. Masyarakat pun menanggapi bahwa dinas sosial sudah cukup terbuka dengan masyarakat sehingga perolehan informasi pun mudah untuk diperoleh oleh masyarakat.
- d) Sikap Pelaksana. Terkait sikap tanggap atau responsivitas dari pelaksana yaitu Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah sangat baik. Pelaksanaan evaluasi kinerja yang rutin dilaksanakan membuat kinerja dari dinas sosial juga sudah tidak perlu diraukan lagi. Tapi kekurangan staf di dinas sosial kedepannya akan menjadi sebuah masalah jika tidak diatasi dengan segera.
- e) Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas/ Aktivitas Pelaksana mengenai akurasi serta konsistensi dari dinas sosial dengan organisasi internal maupun eksternal terus menerus berlangsung dengan baik dan dijaga dengan baik dibuktikan dengan kerjasama-kerjasama antar organisasi. Para unsur pelaksana juga mengetahui batasan serta dapat menjadi penyemangat untuk bekerja lebih giat dari reward yang akan diperoleh.
- f) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik. Dinas sosial berusaha melakukan yang terbaik dalam memberikan bantuan kepada masyarakat penyandang disabilitas. Kementerian Sosial, anggota DPRD, hingga Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru sangat antusias terhadap masyarakat penyandang disabilitas. Dukungan yang besar dari masyarakat juga ikut mensukseskan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

2. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas, yaitu :

- a) Faktor pendukung pada Implementasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas adalah adanya anggaran dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru, adanya dukungan dari Dinas Sosial Provinsi Riau, dan adanya Sumber Daya Manusianya.
- b) Faktor penghambat dalam Implementasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas adalah masih adanya masyarakat penyandang disabilitas yang belum terdata dan masih adanya masyarakat penyandang disabilitas yang enggan membuka diri.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dalam penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Kota Pekanbaru saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Van Meter dan Van Horn.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. 2012. *Kebijakan Publik by Eko Handoyo (z-lib . org)*. 323.
- Akib, H. 2010. Implementasi Kebijakan : Apa, mengapa Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Irawan, Prasetya. *Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2006.
- John W Creswell. 2012. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*.

- Kurniawan, R., Alexandria, M. B., & Nurasa, H. 2018. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn. Responsive*, 1(1), 34–38.
- Maftuhin, A. 2016. *Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas*. *Inklusi*, 3(2).
- Maryani, D. dan R. R. E. N. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish.
- Mayrizka, D. 2015. *Strukturasi Implementasi Kebijakan Disabilitas*. *Jurnal Mahasiswa Sosiologi*, 1–33.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung:Alfabeta.
- Nugroho, R. 2021. *HELMDNDQ 3XEOLN,PSOHPHQWDVL GDQ 3HQJHQGDOLDQ Kebijakan Publik*. Elex Media Komputindo.
- Pawestri, A. 2017. *Hak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM internasional dan nasional*. *Era Hukum*, 2(1), 1–19.
- Purwanto, E. A. 2004. *Revitalisasai Studi Implementasi Kebijakan Publik*. In *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* (Vol. 8, pp. 41–53).
- Sakinah, I., Muchsin, S., & Suyeno. 2020. *Implementasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas(Studi pada Rehabilitasi Sosial Disabilitas Kota Malang)*. *Respon Publik*, 14(3), 43–50.
- Sangihe, K. K. 2017. *Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe*. *Jurnal Eksekutif*, 2(2).
- Shaleh, I. 2018. *Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 63–82.
- Suaib, M. R. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik*.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta,2014.
- Widjajanti, K. 2011. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Model pemberdayaan masyarakat*. 12.

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta:PT Bumi Aksara.

Widodo, J. 2021. *Analisis Kebijakan Publik* (dan I. B. Setiyono Wahyudi, Yuyut Setyorini (ed.); Revisi). Media Nusa Creative.

